



# Kelola Dana Desa Gunakan Aplikasi

**SINTANG**-Sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes sangat relevan dan untuk memperkuat upaya mewujudkan open government, terutama pada level pemerintahan desa.

Hal itu diungkapkan Bupati Sintang, Jarot Winarno disela membuka workshop tatakelola keuangan desa yang digelar kementerian keuangan di Sintang.

Hadir anggota Komisi XI DPR RI, Sukiman, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP, Iskandar Novianto, Irwasda Polda Kalbar, Kombes Pol. Andi Musa, Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Patrick Lumumba Sihombing dan jajaran Forkopimda.

Menurut Jarot Sintang sedang berupaya mewujudkan open government atau pemerintahan terbuka. Pemerintahan yang berkomitmen memberikan peluang sangat luas bagi publik mengakses berbagai informasi. "Mengenai apa saja yang dilakukan pemerintah," kata Jarot.

Ia menambahkan, salah satu ciri open government yakni memanfaatkan aplikasi teknologi informasi. Proses yang dibangun menjadi cepat

◆ Ke Halaman 26 kolom 5



## Kelola Dana Desa Gunakan Aplikasi

*Sambungan dari Halaman 28*

dan efektif serta diyakini sangat bermanfaat karena adaptif dengan era digitalisasi. Kemudian diharapkan mampu mencegah abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Jarot, pemerintah desa sebagai unit dari pemerintah daerah yang saat ini telah mendapat alokasi dana desa dan ADD yang semakin signifikan harus didorong mempraktekkan pemerintahan yang terbuka. Sehingga tata kelola keuangan desa harus semakin transparan, profesional dan partisipatif. "Menciptakan birokrasi pemerintahan desa yang mampu mengelola sumber daya secara efektif, adil, proposional dan lestari," kata Jarot.

Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP, Iskandar Novianto mengatakan, sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes merupakan kerjasama BPKP dengan kementerian dalam negeri yang bertujuan agar pemerintahan desa mampu mengikuti regulasi.

"Kalau tidak menggunakan aplikasi atau secara manual itu beban kerjanya akan sangat berat," ungkapnya.

Iskandar menambahkan aplikasi tersebut mampu menyesuaikan regulasi-regulasi yang ada. Regulasi tersebut terus berkembang dan juga ada perubahan-perubahan. "Kalau desa menggunakan aplikasi, dimana aplikasi tadi selalu menyesuaikan regulasi, maka kita yakin mereka otomatis terjaga bahwa mereka sesuai dengan regulasi dalam pengelolaan keuangan desa," katanya.

Untuk sistem kerjanya, Iskandar menjelaskan bahwa desa itu sebagai pengguna aplikasi dan administrasinya di kabupaten, misalnya untuk desa-desa sudah punya apa kegiatan-kegiatan yang akan di kerjakan saat menyusun RAPBDes.

"Nanti dari kabupaten tinggal mengkomplikasi aja apa yang sudah di susun dan dikerjakan desa dan kalau ada kegiatan-kegiatan yang diubah, pihak desa harus lapor ke kabupaten," katanya. (humas)